

ANALISIS MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PKH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS: NAGARI KUBANG PUTIH KAB. AGAM)

Niken Putri Ayu¹, Rahayu Rizka Aulia²
nikenputriayu0303@gmail.com¹, ime185305@gmail.com²
UIN SMDD Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyaluran program keluarga harapan serta bagaimana pandangan ekonomi islam dalam penyaluran program keluarga harapan yang terjadi di Nagari Kubang Putih. Penelitian ini berdasarkan pada metodologi kualitatif untuk mengetahui penjelasan serta informasi tentang suatu masalah yang dilandaskan pada sudut pandang teori dan konsep yang selaras. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang program keluarga harapan serta bagaimana mekanisme penyaluran program tersebut. Adapun mekanisme yang dijalankan ialah, 1) Proses pendataan dan verifikasi calon penerima, 2) tahap penyaluran dana, 3) kegiatan pendampingan dan edukasi. Disamping itu adapun prinsip-prinsip ekonomi islam dalam penyaluran program keluarga harapan ialah, 1) Konsep keadilan, 2) Prinsip Amanah, 3) Konsep pemberdayaan ekonomi, 4) Masalah, 5) Efektivitas dan etika konsumsi serta prinsip hisbah.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Ekonomi Islam, Mekanisme.

ABSTRACT

This research aims to analyze the distribution mechanism of the family hope program (PKH) and the perspective of islamic economics on the implementation of the program in nagari kubang putih. The study is based on a qualitative methodology to explore explanations and gather information about the issue, using theories and concepts that align with the topic. It examines the structure and objectives of the family hope program, along with the implementation of its distribution mechanisms, which include: 1) the process of data collection and verification of potential beneficiaries, 2) the stage of fund disbursement, and 3) mentoring and education activities. Additionally, the study highlights key principles of islamic economics that should underpin the delivery of the PKH program, such as: 1) the concept of distributive justice, 2) the principle of trustworthiness, 3) the concept of economic empowerment, 4) public interest, 5) efficiency and ethical consumption and 6) the principle of hisbah as a form of moral oversight and accountability.

Keyword: The Family Hope Program (PKH), Islamic Economics, Mechanism.

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini dilandasi pada dasar-dasar yaitu, (keadilan sosial, kebijakan redistribusi dan solidaritas sosial). Dengan landasan ini, PKH tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan melalui investasi jangka panjang pada kualitas hidup manusia. Referensi ini menjadi dasar bagi implementasi PKH sebagai program prioritas nasional yang mengedepankan aspek keadilan, pemberdayaan dan keberlanjutan. (Yusuf)

Calon penerima PKH berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Data ini mencakup keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu seperti memiliki anak sekolah, ibu hamil, anak usia dini, penyandang disabilitas, atau lansia. Lalu Pendamping PKH melakukan validasi data di lapangan untuk memastikan kelayakan penerima manfaat. Dalam pengalokasian PKH dilihat dari berbagai aspek seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan konsumsi, investasi pada pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan kapasitas ekonomi rumah tangga.

Mekanisme pendistribusian Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Kubang Putih, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengikuti kebijakan umum Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Kementerian Sosial dan dijalankan melalui koordinasi dengan Dinas Sosial setempat.

Di Nagari Kubang Putih sendiri, penerima PKH mengalami dinamika jumlah setiap 2 bulan, baik bertambah maupun berkurang, bergantung pada hasil verifikasi data dan pencapaian keluarga penerima manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka misal apabila dalam sebuah keluarga sudah ada yang bekerja sebagai PNS, polri, TNI dan pekerja yang menjanjikan lainnya maka akan dikeluarkan sebagai penerima PKH. Penyaluran bantuan PKH di Nagari Kubang Putih juga melibatkan pengawasan aktif dari pihak pemerintah nagari. Pemerintah Nagari memastikan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan antara PKH dan program bantuan Nagari lainnya, serta menghindari penerima ganda.

Berikut merupakan data presentasi penduduk tidak mampu yang mendapatkan bantuan PKH:

Tabel 1 Data Penduduk Nagari Kubang Putih

Tahun	Penduduk			
	Jlh pria	Jlh wanita	Jlh pria dan wanita	KK
2021	4028	4115	8143	2417
2022	3969	4107	8076	2477
2023	3982	4100	8087	2498
2024	3999	4122	8121	2511

Sumber : Kantor Wali Nagari 2025

Tabel 2 Jumlah Penduduk Miskin dan Penerima PKH di Kubang Putih

Tahun	Jumlah penduduk miskin	Jumlah penerima PKH	Jumlah tidak penerima KPH
2021	70	68	2
2022	190	171	19
2023	91	84	7
2024	99	81	18

Sumber : Wawancara Pendamping PKH Kubang Putih Tahun 2024

Tabel Data Anggaran dan Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH di Nagari Kubang Putih, Kabupaten Agam – Tahun 2024

No	Komponen	Keterangan	Jumlah Penerima	Besar Bantuan (Rp)	Total Anggaran (Rp)
1	Bantuan Tetap	Diberikan kepada setiap KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	150 KPM	550.000 x 4 tahap	330.000.000
2	Komponen Kesehatan	Untuk ibu hamil dan balita	80 individu	3.000.000/tahun	240.000.000
3	Komponen Pendidikan SD	Anak usia SD	90 siswa	900.000/tahun	81.000.000
4	Komponen Pendidikan SMP	Anak usia SMP	65 siswa	1.500.000/tahun	97.500.000

5	Komponen Pendidikan SMA	Anak usia SMA	40 siswa	2.000.000/tahun	80.000.000
6	Komponen Disabilitas dan Lansia	Keluarga dengan anggota difabel atau lansia > 70 thn	25 individu	2.400.000/tahun	60.000.000
Total Anggaran Keseluruhan					888.500.000

Sumber: Kantor BPS Bukittinggi 2025

Dalam perspektif Ekonomi Islam, mekanisme penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi penting untuk dianalisis karena menyangku penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem distribusi kesejahteraan sosial, seperti keadilan dalam alokasi, transparansi dalam pelaksanaan, serta pemberdayaan masyarakat miskin sebagai bentuk tanggung jawab sosial kolektif.

Pendekatan islam terhadap penyaluran bantuan menekankan pentingnya menghindari praktik yang tidak adil, memastikan bantuan tepat sasaran dan mendorong kemandirian mustahik agar tercipta keseimbangan sosial yang selaras dengan prinsip Maqashid Syariah.

Kajian Pustaka

1. Penafsiran Analisis

Analisis adalah kemampuan dalam menyelidiki atau mengidentifikasi keterkaitan antara pernyataan, fakta data, konsep dan dapat menyimpulkannya. (Agnafia:2019)

2. Penafsiran Mekanisme Penyaluran PKH

Cara atau sistem distribusi bantuan social Program Keluarga Harapan (PKH), yakni program pemerintah yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk diindonesia.(Sosial Departemen 2010)

3. Penafsiran Perspektif Ekonomi Islam

Sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih di fokuskan untuk mendeskripsikan keadaan, sifat atau hakikat, nilai suatu objek atau gejala tertentu. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena. Dengan menggunakan pendekatan ini bisa menggali data dan Informasi sebanyak dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian yang bercerita pengalamannya sesuai dengan fakta, peristiwa dan realita, tanpa rekayasa. Selain itu, pembahasannya mendalam karna datanya digali secara mendalam. Dengan demikian tidak ada asumsi diawal penelitian, tetapi berdasarkan pandangan dari informan yang telah dianalisis. (M. Djamal:2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin secara ekonomi agar mampu memenuhi kebutuhan dasar, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Di Nagari Kubang Putih, program ini dilaksanakan sesuai ketentuan dari Kementerian Sosial RI, namun juga menyesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat setempat. Penyaluran bantuan PKH mencakup beberapa tahapan yakni :

1. Proses Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima

Data calon penerima PKH diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan divalidasi oleh pendamping PKH melalui kunjungan langsung ke rumah warga

2. Tahapan Penyaluran Dana

Penyaluran bantuan dilakukan secara non-tunai melalui rekening Bank Himbara menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dana disalurkan dalam empat hingga enam tahap per tahun tergantung kebijakan pusat. Jumlah yang diterima tergantung pada jumlah tanggungan dan kondisi keluarga.

3. Kegiatan Pendampingan dan Edukasi

Selain dana, penerima PKH wajib mengikuti kegiatan edukatif dua bulan sekali dalam bentuk Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Materi yang dibahas mencakup gizi, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Penyaluran PKH

Dalam Perspektif Ekonomi Islam, prinsip utama dalam distribusi kekayaan adalah keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan. Mekanisme penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), jika dilihat dari kacamata Ekonomi Islam, memiliki kesesuaian nilai dalam hal meringankan beban ekonomi mustahik (*orang yang berhak menerima bantuan*), namun juga memunculkan tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

1. Konsep Keadilan Distributif.

Program PKH dalam hal ini telah berupaya mewujudkan keadilan tersebut melalui skema bantuan tunai bersyarat yang difokuskan kepada keluarga miskin dengan anggota rumah tangga rentan (seperti anak sekolah, ibu hamil, atau lansia).

2. Prinsip Amanah

Kegiatan verifikasi langsung ke rumah penerima dan keikutsertaan dalam pertemuan edukatif (P2K2) adalah wujud dari *tasharruf bi al-mas'uliyah* (pengelolaan dengan tanggung jawab).

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi (Taqwiyat Al-Iqtisad).

PKH dapat dikembangkan ke arah produktif zakat, di mana mustahik dibantu bukan hanya dengan uang tunai, tetapi juga pelatihan keterampilan, pembinaan usaha, atau dukungan modal kecil agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri (*al-tanmiyah al-mustadimah*)

4. Masalah dan Kemaslahatan Umum

Penyaluran PKH yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan anak, imunisasi, dan gizi keluarga merupakan bentuk masalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ini sesuai dengan tujuan utama syariat (*maqashid al-shariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

5. Efektivitas dan Etika Konsumsi

Edukasi dalam PKH (seperti dalam pertemuan P2K2) perlu diperkuat tidak hanya dengan materi teknis, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan etika pengelolaan rezeki.

6. Prinsip Hisbah

penguatan pengawasan sosial berbasis keagamaan dari tokoh masyarakat dan ulama berperan besar dalam membentuk akhlak penerima dan memastikan bahwa bantuan digunakan secara halal, bijak, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses penerimaan bantuan PKH dan prinsip-prinsip ekonomi islam terhadap penyaluran bantuan PKH:

Tahapan proses penerimaan bantuan PKH

1. Proses Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima

Proses pendataan dari data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan divalidasi kerumah.

2. Tahapan Penyaluran Dana

Penyaluran bantuan dilakukan secara non-tunai melalui rekening Bank Himbara menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

3. Kegiatan Pendampingan dan Edukasi

kegiatan edukatif dua bulan sekali dalam bentuk Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Prinsip-prinsip ekonomi islam dalam penyaluran bantuan PKH

1. Konsep Keadilan Distributif

bantuan tunai bersyarat yang difokuskan kepada keluarga miskin dengan anggota rumah tangga rentan (seperti anak sekolah, ibu hamil, atau lansia).

2. Prinsip *Amanah*

Kegiatan verifikasi langsung adalah wujud dari *tasharruf bi al-mas'uliyah* (pengelolaan dengan tanggung jawab).

3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi (*Taqwiyat Al-Iqtisad*)

PKH dapat dikembangkan ke arah produktif zakat model agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri (*al-tanmiyah al-mustadimah*).

4. Masalah dan Kemaslahatan Umum

Penyaluran PKH digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini bertepatan tujuan utama syariat (*maqashid al-shariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

5. Efektivitas dan Etika Konsumsi

Dalam menjaga efektivitas penyaluran PKH tidak hanya edukasi dalam PKH (seperti dalam pertemuan P2K2) perlu diperkuat tidak hanya dengan materi teknis, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan etika pengelolaan rezeki.

6. Prinsip *Hisbah*

penguatan pengawasan sosial berbasis keagamaan membentuk akhlak penerima dan memastikan bahwa bantuan digunakan secara halal, bijak, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnafia, D. N. 2019. *Analisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran biologi*. Florea: jurnal biologi dan pembelajarannya
- M. Djamal. 2015. *paradigma penelitian kualitatif*. cet. 1. (Yogyakarta: pustaka pelajar) Publikasi Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2025
Publikasi Wali Nagari Kubang putihah Tahun 2025
- Social, departemen. 2010. *Jurnal PKH*
- Yusuf murah. 2016. *Program keluarga harapan (PKH) sebagai investasi sosial*, Jurnal Ilmiah Rinjani